

Manajemen Partisipatif: Sebuah Pendekatan Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Desa

M. Harry Mulya Zein

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

harry.zein@ipdn.ac.id

Sisca Septiani

STIE Wibawa Karta Raharja

sisseptiani@gmail.com

Korespondensi penulis: harry.zein@ipdn.ac.id

Abstract. Village development will not be separated from community participation because it is the primary beneficiary of development and becomes a development actor. This study examines exploring planning to participatory evaluation involving rural communities in evaluating village development programs. This makes it possible to provide feedback, monitor progress, and identify changes needed to implement development programs. The study used a qualitative approach, using primary data from interviews and relevant secondary data. The results of community research are included in village development planning through Musrebang. In the implementation stage of community development, they are also involved even though not all communities participate in the village development process. Participatory management in development in Liunggunung Village is in the infrastructure development approach and other fields such as health. The community is involved and contributes to infrastructure development and other fields. Community participation can lead to empowering rural communities, increasing their decision-making capacity, and strengthening social networks in communities. Communities involved in the decision-making and implementation of village development projects tend to have a higher sense of ownership of the project. The active participation of the community in village development has a positive impact on the sustainability of the program and the improvement of the community's quality of life. Community participation in village development is essential for sustainable development, community empowerment, and improved quality of life locally.

Keywords: Participatory Management, Village Development

Abstrak. Pembangunan desa tidak akan terlepas dari partisipasi masyarakat karena sebagai penerima manfaat utama dari pembangunan serta menjadi pelaku pembangunan. Penelitian ini mengkaji pada mengeksplorasi perencanaan sampai dengan evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat desa dalam mengevaluasi program pembangunan desa. Ini memungkinkan untuk memberikan umpan balik, memantau kemajuan, dan mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program pembangunan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan data primer yang diambil dari hasil wawancara dan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian masyarakat di ikut sertakan dalam perencanaan pembangunan Desa melalui Musrebang, dalam tahap pelaksanaan pembangunan masyarakat pun ikut terlibat walaupun tidak semua masyarakat ikut dalam proses pembangunan Desa. Manajemen partisipatif dalam pembangunan di Desa Liunggunung tidak hanya dalam pendekatan pembangunan secara infrastruktur tapi di bidang lainnya seperti kesehatan. Masyarakat diikutsertakan dan turut andil dalam pembangunan infrastruktur dan juga dalam bidang lainnya. Partisipasi masyarakat dapat mengarah pada pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan kapasitas mereka dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat jaringan sosial di komunitas. Masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pembangunan desa cenderung memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap proyek tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa memiliki dampak positif pada keberlanjutan program dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai sarana untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup di tingkat lokal.

Kata kunci: Manajemen Partisipatif, Pembangunan Desa

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintah pada pusat ataupun daerah terdapat persoalan yang mendasar di kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu bagaimana membangun pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk menyejahterakan masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah harus melaksanakan pembangunan yang bertujuan untuk memelihara legitimasi, dan membawa kemajuan untuk masyarakatnya sesuai dengan kemajuan jaman. Dalam (McClelland, 2016) Pemerintah bertanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakatnya dan akan berdampak pada perubahan sosial serta ekonomi.

Tujuan utama sebuah organisasi adalah bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam proses pencapaian tujuan organisasi akan semakin kompleks karena tujuan organisasi dipengaruhi keadaan sekelilingnya. Organisasi pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan proses pembangunannya bersifat multidimensional dimana didalamnya berdimensi sosial, ekonomi, politik maupun agama serta banyak hal lainnya.

Pemerintahan desa merupakan mandat warga desa serta sistem pembangunan yang dilaksanakan ialah bagian dari amanat warga itu, alhasil bukan saja hasilnya yang mesti berguna untuk masyarakat namun pula cara pencapaiannya harus senantiasa mengaitkan semua masyarakat baik dengan cara langsung ataupun tidak langsung. Dalam hubungan ini, implementasi konsep manajemen partisipasi menjadi berguna bahkan menjadi ketentuan untuk kesuksesan proses pencapaian tujuan organisasi pemerintahan desa ataupun cara pembangunan yang dilaksanakan. Dalam (Sugiman, 2018) penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa, peran pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan bersifat persuasif untuk rencana, menciptakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa tidak akan terlepas dari partisipasi masyarakat karena sebagai penerima manfaat utama dari pembangunan serta menjadi pelaku pembangunan. Seperti pada penelitian (Samaun, 2022) pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat pada pembangunan desa dengan memberikan pembinaan pada masyarakat tentang kepedulian lingkungan, membangun kapasitas masyarakat pada pengembangan produksi ternak dari pemerintah desa, mendorong proses pengambilan keputusan dalam musyawarah desa.

Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena bisa menumbuhkan rasa memiliki dari masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan dan selanjutnya akan menumbuhkan

rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat diantaranya kesadaran masyarakat, tingkat Pendidikan, pekerjaan, pendapatan, peran pemerintah dalam bersosialisasi, sarana dan prasarana yang dibutuhkan (Muda and Batubara, 2021).

Pembangunan desa secara partisipasi adalah suatu konsep fundamental yang dilakukan semenjak dulu sampai sekarang dan akan tetap relevan untuk masa yang akan datang, partisipasi masyarakat mengikuti perkembangan zaman pada sistem pemerintahan yang berlangsung. Pada system pemerintahan yang sentralistis proses perencanaan pembangunan top-down dan partisipasi masyarakat bersifat mobilisasi, sedangkan pada perencanaan pembangunan bottom-up serta partisipasi masyarakat dilakukan dengan kesadaran. (Adisasmita, 2013).

Penelitian ini mengkaji pada mengeksplorasi perencanaan sampai dengan evaluasi partisipatif yang melibatkan masyarakat desa dalam mengevaluasi program pembangunan desa. Ini memungkinkan untuk memberikan umpan balik, memantau kemajuan, dan mengidentifikasi perubahan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan program pembangunan.

KAJIAN TEORITIS

Desa

Desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Definisi pemerintah desa (Silahiudn, 2013) adalah kepala desa serta perangkatnya yang bisa mengelola sumber daya desa untuk kebutuhan masyarakat, merumuskan dengan baik kebutuhan masyarakat dan membuat perencanaan desa yang baik dengan ketentuan skala prioritas, meningkatkan kemampuan mengimplementasikan peraturan Undang-Undang Desa secara baik dan turunannya, serta mengelola keuangan desa dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.

Manajemen Partisipatif

Manajemen Partisipatif dalam (Muhawid Sulhan dan Soim, 2013) terdiri dari dua kata yaitu manajemen dan partisipasi dimana manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan sedangkan partisipasi merupakan keikutsertaan atau turut berperan dalam suatu kegiatan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dimulai dari perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan yang dikerjakan. Partisipasi masyarakat adalah aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan masyarakat untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program (Adisasmita, 2013).

Pembangunan Desa

Pembangunan desa dibagi menjadi dua yaitu jangka Panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka Panjang untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan (Adisasmita, 2013).

METODE PENELITIAN

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian lapangan yang memperoleh data primer yaitu wawancara, dan data sekunder menggunakan literature (kepuustakaan) berupa buku, artikel serta catatan atau laporan hasil penelitian terdahulu. Lokasi penelitian di Desa Liunggunung Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Miles dan Huberman dengan Langkah reduksi data, penyajian data, Penarikan Simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Partisipatif Desa

Partisipasi masyarakat menurut Astuti dalam (Uceng, 2019) melibatkan seseorang atau kelompok orang dalam suatu kegiatan, dimana keterlibatan ini bisa berupa mental, emosi dan fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki. Dalam perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan agar terlaksana dengan baik ataupun tidak maka pemerintah desa

melaksanakan penyusunan rencana dengan musyawarah pembangunan (Musrenbang), program ini adalah proses dimana masyarakat dilibatkan dalam memberikan usulan, saran dan pendapat yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan untuk prioritas pembangunan daerah .

Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang menurut Slame dalam (Mustanir,2017) Faktor lingkungan fisik seperti kesuburan serta jenis tanah, iklim, tografi dan orbitasi daerah. Selanjutnya faktor sosial ekonomi meliputi jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, Pendidikan. Ketiga faktor social budaya meliputi norma, nilai kepercayaan, pengetahuan, sikap, status pernikahan, usia, jenis kelamin. Terakhir faktor kebijakan pemerintah meliputi sifat koordinasi kepemimpinan, pendekatan untuk memonitor masyarakat.

Untuk melihat apakah perencanaan partisipatif dalam proses pembangunan terlaksana dengan baik atau tidak, maka pemerintah Desa Liunggunung dalam perencanaan melalui Musrenbang melibatkan masyarakat agar dalam proses pembangunan Desa Liunggunung di Kabupaten Purwakarta masyarakat ikut andil didalamnya. RPJM Desa Liunggunung sebagai rencana induk untuk melakukan kegiatan desa yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang berada di Desa Liunggunung atau yang mewakilinya dan semua pihak yang berkepentingan.

Perencanaan Partisipatif dalam Proses Pembangunan Desa

1. Partisipasi Masyarakat pada Tahap Perencanaan

RPJM Liunggunung adalah rencana pembangunan Desa Liunggunung yang menjadi dasar dari dilaksanakannya pembangunan pada lima tahun sehingga akhirnya tercapai tujuan dari perencanaan yang tertuang dalam RPJMDes. Perumusan RPJMDes diikuti oleh masyarakat Desa Liunggunung, seluruh masyarakat dan pihak yang berkepentingan terkait ikut berpartisipasi dalam Menyusun rencana yang dituangkan dalam RPJMDes. Seperti pada penelitian (Ariadi, 2019) perencanaan pembangunan desa melibatkan BPD, unsur masyarakat desa secara partisipatif untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya desa dalam mencapai tujuan pembangunan desa.

Tujuan pembangunan jangka menengah desa merupakan perwujudan melalui upaya pencapaian tujuan pemenuhan hak dasar masyarakat berdasarkan Visi dan Misi pembangunan Desa Liunggunung. Kebijakan pembangunan yang sudah tersusun tersebut selanjutnya dituangkan di dalam rencana kegiatan. Rencana kegiatan akan dipilah menjadi 2 (dua) yaitu

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah semua aspek dan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berhubungan secara langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat/indeks pembangunan manusia. Mencakup bidang dan kegiatan: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Sarana prasarana, 4) Lingkungan hidup, 5) Sosial budaya, 6) Pemerintahan, dan 7) Koperasi dan usaha masyarakat. Urusan pilihan adalah aspek dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi dan potensi setempat, mencakup; 1) Pertanian, 2) Kehutanan, 3) Pertambangan. Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur, dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya serta menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.

Tujuan RPJM Desa Liunggunung 2017-2023 menyediakan dasar dan pedoman resmi untuk seluruh jajaran aparatur Desa Liunggunung, Bamusdes, Lembaga Kemasyarakatan, serta seluruh elemen masyarakat yang dibiayai dari APBDes Liunggunung dan anggaran jenjang unit di atasnya, Menyediakan tolak ukur untuk evaluasi kinerja tahunan, menjabarkan gambaran umum desa sekarang, memudahkan seluruh jajaran Pemerintah Desa, Bamusdes dan pihak lainnya dalam mencapai tujuan dengan penyusunan program.

RPJM Desa Liunggunung merumuskan visi Desa Liunggunung yaitu “ tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui peningkatan pembangunan di segala bidang”.

2.Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Liunggunung

Partisipasi masyarakat dimulai dari keikutsertaan dalam perencanaan pembangunan dimana masyarakat terlibat hadir dalam kegiatan musyawarah, hal ini sesuai dengan penelitian (Jannah and Rodiyah, 2021). Pelaksanaan dilakukan menjadi dua tahap yaitu:

a. Tahap pertama (2017-2019)

Pada tahap pertama ini tujuan untuk mencapai harapan dan target sasaran yang hendak dicapai meliputi pengelolaan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi desa serta memperhatikan peluang yang ada secara terpadu untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa yang mengarah pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan SDM dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada yang mendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Desa.

b. Tahap Kedua (2020-2023)

Pada tahapan kedua ini diharapkan semua daya dan potensi serta upaya untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang transparan, akuntabel, serta peningkatan dan SDM

Perangkat menunjang profesionalisme pelayanan publik serta mendorong pembangunan sektor ekonomi yang berkeadilan dengan meningkatkan produk-produk unggulan lokal.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Menurut Pasal 1 ayat 41 UU No. 23 Tahun 2014, partisipasi masyarakat berarti warga negara membawa keinginan, gagasan, dan kepentingannya ke dalam pengelolaan pemerintah daerah. Desa sebagai bagian terkecil dari pemerintahan berhak merencanakan pembangunan untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakatnya, dan pemerintah desa adalah yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah desa dapat mengelola segala urusan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), administrasi dan pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sebagaimana yang termaktub dalam asas otonomi daerah dan dalam UUD, Peraturan Pemerintah (PP) dan surat edaran Menteri Dalam Negeri, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat diperlukan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam bidang pembangunan baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.

Empat bentuk partisipasi masyarakat dapat dibedakan atas: a) pengambilan keputusan masyarakat, b) berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, c)berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan, dan d) berpartisipasi memanfaatkan hasil pembangunan. Masyarakat Desa Liungunung sebagian besar telah melaksanakannya, dimulai dari pengambilan keputusan walaupun tingkat partisipasinya belum optimal. Secara umum tingkat partisipasi masyarakat bisa dilihat sebagai keterlibatan masyarakat yang secara sadar dan sukarela ikut serta dalam berbagai hal, mulai dari pembangunan hingga keikutsertaannya dalam berbagai urusan desa. Kontribusi masyarakat juga dapat berupa ide maupun tenaga. Di Desa Liungunung, partisipasi masyarakat dapat berupa banyak hal, salah satunya adalah partisipasi dalam proses musyawarah rencana pembangunan desa. Sejalan dengan (Sabardila, 2020) seluruh elemen masyarakat dapat menyumbangkan aspirasinya dan keterlibatan dalam pembangunan.

3. Permasalahan pada Rencana Pembangunan Desa Liungunung

Pada tahap proses perencanaan masyarakat Desa Liungunung mempersiapkan bagaimana rancangan ke depan pembangunan yang akan dilaksanakan. Perencanaan merupakan salah satu proses yang penting karena merupakan suatu prosedur yang secara umum dimaksudkan untuk membantu merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan.

Berdasarkan Peraturan Desa Liunggunung nomor 01 Tahun 2012 tentang RPJMDes Desa Liunggunung pada dari tahun 2017 prioritas masalah yang telah diselesaikan secara Bersama dengan masyarakat seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Permasalahan dalam Pembangunan di Desa Liunggunung

NO	MASALAH	LOKASI	KETERANGAN
1	Sebagian jalan yang lingkungan perlu peningkatan dengan perkerasan.	Desa	Sudah dilaksanakan peningkatan
2	Waktu hujan jalan menuju Kp. Haurnunggal tidak bisa dilalui	RT. 022	Jalan sudah dapat dilalui
3	Jauhnya jangkauan warga masyarakat ke Tempat Pemakaman Umum (TPU)	RT. 011 s.d RT. 013	Sudah terdapat akses dekat
4	Warga masyarakat desa masih ada yang kondisi rumahnya kurang layak huni	Desa	Terdapat bantuan dari pemerintah untuk masyarakat desa yang rumahnya tidak layak huni, masyarakat berotong royong dalam membantu pembangunan.
5	Saluran parit jalan-jalan lingkungan menghambat lancarnya aliran air.	Dusun III	Saluran parit lancar
6	Banyak kader yang belum mendapatkan kesejahteraan yang layak	Desa	Sudah diberikan kesejahteraan
7	Sulitnya mendapatkan Air bersih saat musim kemarau	Desa	Penyediaan bantuan air bersih oleh pemerintah Desa
8	Pemerintah Desa dan lembaga lainnya belum memiliki jaminan kesehatan	Desa	Sudah ada jaminan Kesehatan
9	Banyaknya sarana dan prasarana keagamaan yang sudah rusak dan tidak memadai	Desa	Perbaikan sarana dan prasarana keagamaan dengan
10	Tidak terjaminnya Tempat Pemakaman Umum yang dijadikan tempat bermain dan tempat gembala.	RT. 016 sd. RT. 020	Belum teralisasi
11	Belum adanya batas-batas wilayah/batas desa	RT. 011	Sudah dibangun batas wilayah desa
12	Sering terjadinya banjir	RW 05 & 06	Perbaikan saluran air agar tidak terjadi banjir
13	Belum adanya saluran drainase	RW 02 & 07	Sudah dibangun saluran drainase

Sumber Data: Data Hasil Wawancara

Berdasarkan tabel.1 di atas maka permasalahan yang sebelumnya ada dengan adanya RPJMDes dan partisipasi masyarakat, sudah mulai teratasi di akhir penghujung tahun berakhirnya RPJMDes ini, artinya tujuan yang sudah dirumuskan bersama-sama sudah mulai tercapai.

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan

analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa dan masih belum teratasi .

Masalah tersebut meliputi :

1. Sebagian besar jalan lingkungan kondisinya rusak, untuk mengantisipasinya perlu segera melakukan peningkatan jalan lingkungan, jalan di Desa Liunggunung sebagai jalan transportasi bagi kendaraan pengangkut hasil tambang sehingga jalan yang sudah diperbaiki mudah rusak.
2. Digunakannya Tempat Pemakaman Umum (TPU) untuk sarana bermain, jalan umum dan gembala sehingga perlu pemagaran tempat pemakaman umum.

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi masyarakat pada proses pembangunan sangatlah penting. Hal ini karena tanpa partisipasi anggota masyarakat, program pembangunan tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan, baik sekarang maupun di masa depan. Agar pembangunan dapat berhasil, upaya anggota masyarakat harus berasal dari kesadaran dan tanggung jawab mereka sebagai manusia dalam masyarakat, dan diharapkan akan tumbuh melalui partisipasi mereka. Tentu saja, untuk memotivasi masyarakat yang berpartisipasi, pemerintah perlu memberikan insentif agar pembangunan dapat berlangsung. Pada tahap perencanaan inilah masyarakat Desa Liunggunung akan mulai mempersiapkan bagaimana mereka ingin membentuk pembangunan di masa depan. Proses perencanaan menjadi sangat penting karena secara umum merupakan langkah untuk mengelola perubahan masyarakat dengan mengembangkan strategi dalam kerangka kerja yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan.

Masyarakat dilibatkan sejak perencanaan dalam pembuatan RPJMDes, tetapi tidak semua masyarakat berpartisipasi dalam mengungkapkan keinginannya untuk kebutuhan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam hal berkonsultasi masih kurang dirasakan oleh masyarakat Liunggunung,. Masyarakat berpartisipasi dimulai dari pelaksanaan pembangunan jalan, parit, pembangunan sarana dan prasarana ibadah yang rusak, rumah masyarakat yang tidak layak huni. Partisipasi masyarakat tidak akan ada jika pemerintah desa tidak memiliki peran dalam mengayomi masyarakat, seperti halnya (Angelia, 2020) besarnya peran yang dimiliki pemerintah desa dimulai dari menumbuhkan dinamika masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat selain itu menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong swadaya desa.

5. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting, dan tanpa partisipasi mereka, rencana pembangunan yang telah atau sedang dilaksanakan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Untuk mencapai pembangunan yang sukses, inisiatif dari anggota masyarakat berasal dari rasa memiliki dan tanggung jawab sebagai orang yang hidup di masyarakat, dan hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi mereka. Tentu saja, ada insentif dari pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Kesiapan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ada tiga hal: pertama, terkait dengan rasa memiliki; kedua, terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan; dan ketiga, terkait dengan kebutuhan masyarakat secara umum.

Proses regenerasi yang langgeng membutuhkan kerja sama dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam semua aspek pembangunan. Kerja sama yang diharapkan pemerintah dari masyarakat adalah partisipasi, di mana masyarakat menyumbangkan kapasitasnya dalam bentuk ide, keterampilan, material, dan jika memungkinkan, uang.

6. Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi Pembangunan

Partisipasi publik dalam evaluasi dapat berupa pemantauan hasil kebijakan publik dan implementasinya. Pada tahap ini, masyarakat harus mengkritisi apa yang telah ditemukan atau diimplementasikan oleh pemerintah. Tanpa adanya evaluasi dari masyarakat, implementasi kebijakan publik bisa menjadi bias. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Liungnung sudah cukup tinggi. Fokus pembangunan nasional adalah pada pembangunan desa karena pembangunan bukan hanya usaha pemerintah atau masyarakat saja, tetapi merupakan kegiatan kolektif yang harus membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, dan keberhasilan pembangunan Desa Liungnung mencerminkan keberhasilan pembangunan nasional.

7. Hambatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Liungnung

Kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia merupakan hal yang penting yang dimiliki masyarakat karena akan mampu meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan, salah satu kepedulian pemerintah pada pengembangan wilayah pedesaan yaitu adanya anggaran pembangunan khusus dalam APBD untuk desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), inilah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah Desa agar program pemerintah desa yang ditunjang swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang sudah disusun dalam RPJMDes bisa terealisasi.

Faktor lain penghambat adalah tingkat Pendidikan masyarakat, rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat Desa Liunggunung menjadi salah satu kendala untuk pencapaian program pembangunan, pola pikir masyarakat dengan Pendidikan yang rendah maka akan terbatas terhadap program yang dilaksanakan pemerintah desa seperti adanya penyuluhan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian berikut merupakan tingkat pendidikan masyarakat Desa Liunggunung :

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Liunggunung

No	Jenjang Pendidikan	Persentase (%)
1.	SD/Sederajat	60
2.	SLTP/Sederajat	25
3.	SLTA/Sederajat	10
4.	Akademi/D1-D3	0,2
5.	Sarjana	0,2
6.	Tidak tamat SD	2,6
7.	Tidak/belum sekolah	2

Dari Tabel 2 di atas maka dapat dilihat tingkat Pendidikan masyarakat di desa Liunggunung dengan Pendidikan rata-rata masih rendah. Hal ini akan berpengaruh pada pemahaman masyarakat akan partisipasi pada pembangunan. Hal ini sejalan dengan (Putra, 2019) rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat yang menjadi kendala untuk mencapai program pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat di ikut sertakan dalam perencanaan pembangunan Desa melalui Musrembang, dalam tahap pelaksanaan pembangunan masyarakat pun ikut terlibat walaupun tidak semua masyarakat ikut dalam proses pembangunan Desa. Manajemen partisipatif dalam pembangunan di Desa Liunggunung tidak hanya dalam pendekatan pembangunan secara infrastruktur tapi di bidang lainnya seperti kesehatan. Masyarakat diikutsertakan dan turut andil

dalam pembangunan infrastruktur dan juga dalam bidang lainnya. Partisipasi masyarakat dapat mengarah pada pemberdayaan masyarakat desa, meningkatkan kapasitas mereka dalam pengambilan keputusan, dan memperkuat jaringan sosial di komunitas.

Masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan proyek pembangunan desa cenderung memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap proyek tersebut. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa memiliki dampak positif pada keberlanjutan program dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sebagai sarana untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup di tingkat lokal.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu Kesulitan dalam mengukur dampak, Mengukur dampak konkret dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bisa menjadi tantangan. Mengidentifikasi sejauh mana partisipasi masyarakat berkontribusi terhadap hasil pembangunan yang positif dan keberlanjutan dapat sulit karena adanya faktor-faktor eksternal dan variabel yang sulit dikendalikan.

DAFTAR REFERENSI

- Aguswan, A., Saputra, T., Astuti, W., Eka, E., & Syofian, S. (2020). Bimbingan Teknis Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar. *Warta LPM*, 23(1), 63-72.
- Angelia, N., Batubara, B. M., Zulyadi, R., Hidayat, T. W., & Hariani, R. R. (2020). Analysis of Community Institution Empowerment as a Village Government Partner in the Participative Development Process. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol*, 3(2), 1352-1359. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.991>
- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135-147.
- Bihamding, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Deepublish.
- Ibrahim, M., Mustanir, A., & Adnan, A. A. (2020). Pengaruh Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. *Movere Journal*, 2(2), 56-62.
- Irwan, I., Latif, A., & Mustanir, A. (2021). Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *GEOGRAPHY: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 9(2), 137-151.
- Jannah, A., & Rodiyah, I. (2021). Community Participation in Village Infrastructure Development Planning. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 10, 10-21070. Jannah, A., & Rodiyah, I. (2021). Community Participation in Village Infrastructure Development Planning. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 10, 10-21070.
- Karim, H. A. (2021). Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan: Pendekatan Manajemen Partisipatif. *Arti Bumi Intaran*.
- Lantang, A. P., Tulus, F., & Laloma, A. (2022). Manajemen Partisipatif Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sea Tumpengan Kecamatan Pineleng Kab.

Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(113).

- McClelland, A. (2002). Kewajiban bersama dan tanggung jawab kesejahteraan pemerintah. *Jurnal Masalah Sosial Australia*, 37 (3), 209-224. <https://doi.org/10.1002/j.1839-4655.2002.tb01118.x>
- Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192-200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Mustanir, A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247-261. <https://doi.org/10.24252/profetik.v5i2a6>
- Putra, O. F. (2019). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Jalan Di Desa PENDINGIN Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara. *Journal Ilmu Sosiatri-Sosiologi*, 7(3), 81-92.
- Rakhmadani, R. (2021). Komunikasi Pembangunan Partisipatif dalam Pengembangan Desa Wisata Sajen Edu Adventure Melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 25(1), 33-44.
- Rifai, M. (2019). Peran Manajemen Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Boalemo Pada Sektor Promosi Potensi Pariwisata. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2), 30-40.
- Sabardila, A., Setiawaty, R., & Markhamah, M. (2020). Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Bugel Kecamatan Polokarto Melalui Program Sosialisasi. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, 4(2), 235-246. <https://doi.org/10.36841/integritas.v4i2.556>
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18-33. <https://doi.org/10.37195/jipik.v1i1.18>
- Simanjuntak, A., & Silitonga, I. M. (2020). Pengaruh Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Peningkatan Kualitas Perencanaan Partisipatif Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan: Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat. *Methodika: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 3(2), 97-112.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Uceng, A., Ali, A., Mustanir, A., & Nirmawati, N. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 1-17. <http://dx.doi.org/10.25147/moderat.v5i2.2125>
- Uceng, A., Erfina, E., Mustanir, A., & Sukri, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 18-32.